



Research Article

## Konstruksi Pendidikan Gender Dalam Islam: Respon Kasus Non-Biner dan Konsekuensinya Terhadap Bias Gender di SMA Kota Bandung

Muhammad Luthfi Mubarak<sup>1</sup>, Muhammad Abdurrasyid Ridlo<sup>2\*</sup>, Tita Yulawati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia

\*penulis korespondensi: [muhammadrasyid9442@gmail.com](mailto:muhammadrasyid9442@gmail.com)

### Abstrak

#### Article history:

Received 13 Oct 2024

Revised 18 Oct 2024

Accepted 31 Oct 2024

#### Kata kunci:

Pendidikan Gender;  
Respon; Pendidikan  
Islam; Sekolah  
Menengah Atas

Penelitian ini bertujuan untuk membangun pendidikan gender di sekolah menengah atas kota Bandung, dengan fokus pada tanggapan terhadap siswa non-biner dan implikasinya terhadap bias gender. Latar belakang penelitian ini adalah ketidakselarasan antara ajaran Islam tentang keadilan gender dan praktik pendidikan yang masih menunjukkan bias terhadap identitas non-biner. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan inklusif diterapkan dan dampaknya terhadap kesejahteraan siswa non-biner di lingkungan sekolah menengah atas. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif menggunakan studi kasus, yang meliputi wawancara mendalam, analisis dokumen sekolah, dan observasi langsung di beberapa sekolah. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan inklusif dapat mengurangi bias dan meningkatkan kesejahteraan siswa non-biner, tantangan seperti resistensi budaya dan kurangnya pelatihan guru masih menghambat efektivitasnya serta. Kesimpulan penelitian ini menyoroti pentingnya pelatihan yang komprehensif dan keterlibatan masyarakat dalam proses perubahan kebijakan. Implikasi dari penelitian ini merekomendasikan agar lembaga pendidikan meningkatkan upaya pendidikan dan evaluasi rutin terhadap kebijakan inklusif untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih adil dalam konteks identitas gender.

## PENDAHULUAN

Pendidikan dalam perspektif Islam menekankan pentingnya nilai-nilai moral, etika, dan keadilan sosial. Salah satu aspek penting dalam pendidikan Islam adalah penerapan kesetaraan gender, yang tidak hanya mempromosikan keadilan tetapi juga menghormati keberagaman identitas manusia. Di tengah perkembangan sosial yang semakin kompleks, identitas gender non-biner menjadi isu yang semakin mengemuka. Identitas non-biner merujuk pada individu yang tidak sepenuhnya mengidentifikasi diri sebagai laki-laki atau Perempuan (Dimitroulia & Kazamias, 2024). Dalam konteks pendidikan Islam, penting untuk memahami bagaimana konsep ini dapat diakomodasi dalam sistem pendidikan guna menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil. Kasus identitas gender non-biner sering kali menimbulkan dilema dalam pendidikan Islam, terutama karena adanya pandangan tradisional yang kuat mengenai peran gender (Wahyudi et al., 2019). Sekolah Menengah Atas (SMA), sebagai salah satu fase penting dalam perkembangan siswa, memiliki peran krusial dalam membentuk pandangan dan pemahaman siswa mengenai gender. Namun, bias gender yang masih kental di banyak institusi pendidikan dapat menghambat upaya untuk menciptakan lingkungan inklusif bagi siswa non-biner. Hal

ini memerlukan pendekatan yang holistik dan sensitif terhadap nilai-nilai Islam, agar dapat menyeimbangkan antara ajaran agama dan kebutuhan siswa yang beragam dalam konteks identitas gender.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kesadaran global mengenai hak-hak individu dengan identitas gender yang beragam, termasuk di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Beberapa negara telah mulai mengadopsi kebijakan inklusif yang menghargai dan melindungi hak-hak individu non-biner (Dipoyudo, 1980). Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini di sekolah-sekolah, khususnya di Indonesia, masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk resistensi budaya dan kurangnya pemahaman tentang isu-isu gender dalam konteks Islam. Dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia, penting untuk mengeksplorasi bagaimana institusi pendidikan dapat merespon secara konstruktif terhadap kasus non-biner, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan inklusivitas yang diajarkan oleh Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam menerapkan pendidikan gender yang inklusif di SMA, serta mengkaji dampaknya terhadap bias gender di lingkungan sekolah.

Penelitian mengenai konstruksi pendidikan gender di sekolah menunjukkan berbagai pendekatan dan tantangan dalam menciptakan lingkungan inklusif bagi siswa dengan identitas gender netral atau non-biner. Pertama, Ahmad Riad, Faizaluddin, dan Romaida (2022) dalam “Penguatan Pendidikan Gender (Telaah Kritis Dalam Perspektif Islam)” menyoroti pentingnya penguatan pendidikan gender dalam memahami identitas gender yang beragam dan bagaimana hal ini dapat memberikan batasan dalam berbagai kecenderungan gender yang bias perspektif Islam (Ahmad Riad et al., 2022). Kedua, studi oleh Achmad Saeful (2019) dalam “Kesetaraan Gender dalam Dunia Pendidikan” menyimpulkan bahwa kesetaraan gender dalam dunia pendidikan masih merupakan bahasan yang tabu, sehingga iklim kesetaraan gender dalam dunia Pendidikan kurang dirasakan, mengakibatkan kesenjangan dalam implementasi di berbagai sekolah (Saeful, 2019). Ketiga, penelitian oleh Rustam dan Situmorang (2020) dalam “Memahami Perbedaan Gender Dalam Perspektif Islam Dan Socio-Kultural” mengungkapkan bahwa meskipun ada upaya untuk menyediakan fasilitas ramah gender, masih banyak hambatan struktural dan budaya yang perlu diatasi (Rustam & Situmorang, 2020). Terakhir, studi oleh Paechter, Toft, dan Carlile (2021) dalam “Non-binary Young People and Schools: Pedagogical Insights From a Small-Scale Interview Study” menyoroti bahwa kurangnya pemahaman tentang identitas gender non-biner di kalangan siswa dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan akademis mereka (Paechter et al., 2021). Keempat artikel ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang tantangan dan strategi dalam mengimplementasikan pendidikan gender yang inklusif di sekolah-sekolah Indonesia.

Berdasarkan tinjauan di atas, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan utama: Bagaimana konstruksi pendidikan gender dalam Islam dapat diterapkan di sekolah-sekolah menengah atas untuk merespon kasus non-biner dan apa konsekuensinya terhadap bias gender di lingkungan sekolah? Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pendekatan yang efektif dalam mengintegrasikan konsep pendidikan gender dalam Islam yang inklusif terhadap siswa non-biner di SMA. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari pendekatan tersebut terhadap bias gender di sekolah. Kegunaan penelitian ini adalah untuk menyediakan rekomendasi kebijakan dan praktik pendidikan yang dapat diadopsi oleh sekolah-sekolah Islam guna menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi semua siswa, serta memperkaya literatur mengenai pendidikan gender dalam konteks Islam.

Kerangka teoretis penelitian ini akan didasarkan pada teori gender dalam Islam dan teori interseksionalitas. Teori gender dalam Islam mengkaji bagaimana ajaran-ajaran agama dapat diinterpretasikan untuk mendukung kesetaraan dan inklusivitas gender. Sementara itu, teori interseksionalitas memberikan perspektif mengenai bagaimana berbagai faktor identitas seperti gender, agama, dan budaya saling berinteraksi dan mempengaruhi pengalaman individu. Dengan menggunakan kedua kerangka konsep ini, penelitian ini akan menganalisis bagaimana pendidikan Islam dapat merespon identitas gender non-biner dan dampaknya terhadap bias gender di lingkungan sekolah, serta mengidentifikasi strategi yang dapat diterapkan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif.

## METODE

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang konstruksi pendidikan gender dalam Islam dan respons terhadap kasus non-biner di SMA Kota Bandung (Darmalaksana, 2020). Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan guru dan siswa melalui analisis dokumen kebijakan sekolah dan materi pengajaran terkait gender (Darmalaksana, 2020, 2022; Darmalaksana & Kulsum, 2022). Observasi langsung di sekolah juga akan dilakukan untuk melihat implementasi kebijakan dan praktik sehari-hari. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif untuk mengidentifikasi pola dan tema utama yang terkait dengan tantangan dan dampak bias gender di lingkungan sekolah (Raco, 2010). Melalui, pendekatan ini akan mengeksplorasi secara menyeluruh terhadap pengalaman dan persepsi berbagai pihak terkait, serta identifikasi strategi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan adil.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam memiliki berbagai ajaran mengenai gender yang dapat diinterpretasikan secara berbeda dalam konteks pendidikan modern. Ajaran-ajaran ini, baik dari Al-Quran maupun Hadith, seringkali mengatur peran dan tanggung jawab gender dalam masyarakat. Salah satu teks sentral adalah Surah An-Nisa (4:1), yang menekankan penciptaan manusia dari satu jiwa, yang menunjukkan kesetaraan dasar antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam praktiknya, tafsiran atas ayat ini seringkali dipengaruhi oleh konteks budaya dan interpretasi ulama. Tafsir klasik menekankan peran gender yang lebih terpisah, sementara tafsir kontemporer berusaha untuk memahami ayat ini dalam kerangka kesetaraan gender yang lebih luas (Al-Khuli, 1982; Rustam & Situmorang, 2020; Suhra, 2013). Dalam konteks pendidikan, interpretasi ajaran ini dapat berdampak signifikan pada bagaimana identitas gender non-biner diterima di sekolah-sekolah menengah atas (Wahyudi et al., 2019). Kebijakan pendidikan yang didasarkan pada pemahaman klasik tentang gender mungkin tidak mencakup atau bahkan menolak pengakuan identitas non-biner, menciptakan lingkungan yang tidak inklusif bagi siswa yang identitasnya tidak sesuai dengan kategori laki-laki atau perempuan (Harahap, 2013). Sebaliknya, pendekatan yang lebih adaptif, yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam, dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih suportif (Fitriani, 2022).

Prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan dalam Islam memiliki potensi besar untuk mendukung penerimaan identitas gender non-biner di lingkungan pendidikan. Prinsip keadilan (*adl*) dan kesetaraan (*musawah*) yang dipegang dalam ajaran Islam menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap semua individu (Fairuzillah et al., 2023). Mengadopsi prinsip-prinsip ini dalam kebijakan pendidikan berarti menciptakan ruang di mana setiap siswa, terlepas dari identitas gender mereka, dapat merasa diterima dan dihargai (Zubaida, 2005). Hal ini termasuk memastikan bahwa kebijakan sekolah dan materi pengajaran mencerminkan keberagaman identitas gender dan menyediakan dukungan yang diperlukan bagi siswa non-biner. Dengan mengintegrasikan ajaran-ajaran Islam yang mendukung kesetaraan dan keadilan, serta dengan penafsiran yang lebih inklusif terhadap teks-teks agama, sekolah-sekolah menengah atas dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih adil dan mendukung untuk semua siswa. Ini mencakup pelatihan bagi pendidik untuk memahami dan mengatasi isu gender dengan sensitivitas, serta pengembangan kebijakan yang mengakui dan menghargai keragaman identitas gender. Melalui pendekatan ini, prinsip-prinsip Islam tentang keadilan dan penghormatan dapat diterapkan untuk menciptakan pendidikan yang benar-benar inklusif dan mendukung seluruh siswa (Mohammad, Hendra & Nurul, 2023; Suhra, 2013; Wahyudi et al., 2019).

Sekolah-sekolah menengah atas berbasis Islam sering menghadapi tantangan dalam merespons siswa non-biner, terutama terkait dengan kebijakan inklusif yang ada. Beberapa sekolah telah mencoba untuk mengadopsi kebijakan yang lebih inklusif dengan mempertimbangkan identitas gender non-biner, namun implementasi kebijakan ini bervariasi. Sebagai contoh, beberapa sekolah telah mengembangkan pedoman yang memungkinkan penggunaan nama dan pronoun yang sesuai dengan identitas gender siswa non-biner, meskipun penerapan kebijakan ini sering kali terhambat oleh pandangan konservatif tentang gender dalam masyarakat. Di beberapa sekolah berbasis Islam yang telah mengadopsi kebijakan inklusif, kebijakan tersebut umumnya melibatkan pengakuan dan dukungan terhadap keberagaman identitas gender. Namun, implementasi kebijakan ini sering kali menghadapi tantangan, seperti

resistensi budaya dan kekurangan sumber daya. Berikut adalah tabel yang menggambarkan kebijakan inklusif pada beberapa sekolah menengah atas di kota Bandung:

**Tabel 1.** Kebijakan Inklusif di Sekolah Menengah Atas Kota Bandung

<i>Sekolah</i>	<i>Kebijakan Inklusif</i>	<i>Tantangan</i>	<i>Implikasi</i>
<i>Sekolah A</i>	Kebijakan pengakuan identitas gender non-biner	Resistensi dari beberapa orang tua dan guru	Penerimaan siswa meningkat; Namun, dukungan administratif terbatas
<i>Sekolah B</i>	Penggunaan bahasa netral gender dalam materi ajar	Kurangnya pelatihan bagi guru	Penggunaan bahasa netral mulai diterima secara luas
<i>Sekolah C</i>	Fasilitas ramah gender seperti toilet netral	Keterbatasan fasilitas fisik	Fasilitas tambahan berhasil mengurangi diskriminasi

Sekolah A, mengalami tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan inklusif. Meskipun telah mengadopsi beberapa kebijakan ramah gender, resistensi dari orang tua dan anggota komunitas menyebabkan keterbatasan dalam pelaksanaan. Hasil wawancara dengan siswa dan guru menunjukkan bahwa walaupun kebijakan di atas kertas mendukung inklusivitas, praktik di lapangan sering kali tidak sesuai dengan harapan.

Sekolah B, memiliki pendekatan berbeda dengan fokus utama pada pelatihan guru. Mereka menyelenggarakan pelatihan berkala tentang sensitivitas gender dan inklusi. Data dari evaluasi pelatihan menunjukkan bahwa guru yang mengikuti pelatihan merasa lebih siap untuk menangani isu gender dan mendukung siswa non-biner. Namun, keberhasilan ini terkendala oleh kekurangan materi pelajaran yang mencerminkan keragaman gender.

Sekolah C, yang terletak di wilayah dengan komunitas Muslim yang lebih progresif, telah mengadopsi kebijakan inklusif gender yang meliputi penggunaan pronoun yang sesuai dan fasilitas ramah gender. Data dari observasi menunjukkan bahwa kebijakan ini telah berhasil menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, meskipun masih ada tantangan dalam mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa meskipun beberapa sekolah berbasis Islam telah membuat kemajuan dalam merespon siswa non-biner melalui kebijakan inklusif, pelatihan guru, penggunaan bahasa netral gender, dan fasilitas ramah gender, tantangan signifikan tetap ada. Untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang benar-benar inklusif, diperlukan usaha yang berkelanjutan untuk mengatasi resistensi budaya, menyediakan pelatihan yang memadai, dan mengatasi keterbatasan sumber daya. Dukungan administratif yang kuat dan komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan akan menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi kebijakan inklusif gender di sekolah-sekolah menengah atas berbasis Islam. Analisis konten dari dokumen kebijakan, materi pengajaran, dan observasi menunjukkan bahwa meskipun beberapa sekolah telah membuat langkah maju dalam mendukung siswa non-biner, implementasi masih terhambat oleh berbagai faktor, termasuk resistensi budaya dan kekurangan pelatihan. Sekolah-sekolah yang telah sukses dalam mengadopsi kebijakan inklusif sering kali melibatkan pelatihan komprehensif untuk guru dan melibatkan komunitas dalam proses perubahan respon terhadap status gender.

## SIMPULAN

Kebijakan inklusif di sekolah menengah atas berbasis Islam dapat mengurangi bias gender dan meningkatkan kesejahteraan siswa non-biner dengan secara aktif mengakomodasi kebutuhan identitas gender yang beragam. Meskipun implementasi kebijakan ini menunjukkan potensi untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung, tantangan seperti resistensi budaya dan kekurangan pelatihan guru masih perlu diatasi. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan inklusif, disarankan agar lembaga pendidikan meningkatkan pelatihan bagi guru dan staf mengenai kepekaan gender serta melibatkan komunitas dalam proses perubahan kebijakan. Evaluasi dan pembaruan berkala terhadap

kebijakan inklusif juga penting untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam mendukung semua siswa. Penelitian selanjutnya sebaiknya fokus pada studi kasus yang lebih luas dan analisis dampak jangka panjang dari kebijakan inklusif terhadap sekolah dalam skala makro dan kritik atas kebijakan yang mendukung konsep bias gender menurut batasan dalam ajaran Islam.

## REFERENSI

- Ahmad Riad, Faizaluddin, & Romaida. (2022). Penguatan Pendidikan Gender (Telaah Kritis Dalam Perspektif Islam). *Symfonia: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 165–178. <https://doi.org/10.53649/symfonia.v2i2.26>
- Al-Khuli, A. (1982). *At-Tafsir: Nasy'atuh-Tadarrujuh-Tathawwuruh*. Dar al-Kutub al-Libanuni.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–6.
- Darmalaksana, W. (2022). Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir. *Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–40. <https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/48611%0A>
- Darmalaksana, W., & Kulsum, E. M. (2022). Meningkatkan Kapasitas Berpikir Kritis untuk Tantangan Era Disrupsi 4.0 Berdasarkan Inspirasi Sabda Rasulullah dengan Menggunakan Analisis Higher Order Thinking Skills. *Gunung Djati Conference Series*, 8, 304–318.
- Dimitroulia, T., & Kazamias, A. (2024). Gender and Diaspora in Late Ottoman Egypt: The Case of Greek Women Translators. In *Migrating Texts* (hal. 149–192). Edinburgh University Press. <https://doi.org/10.1515/9781474439015-009>
- Dipoyudo, K. (1980). Wanita: Hakikat dan Panggilannya. *ANALISA*.
- Fairuzillah, M. N., Mumtazi, F., & Sutoyo, Y. (2023). Non-binary Gender dan Pendidikan Fitrah Seksualitas Anak. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2), 163–179. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v12i2.8867>
- Fitriani, F. (2022). Integrasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Persektif Al-Quran Melalui Penguatan Literasi Media. *Al-Fikri: Jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam*, 4(2), 97–106. <https://doi.org/10.30659/jspi.v4i2.18988>
- Harahap, R. D. K. A. (2013). Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 8(2), 361. <https://doi.org/10.21580/sa.v8i2.662>
- Mohammad, Hendra & Nurul, H. (2023). Kesetaraan Gender Dalam Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(1), 1–14.
- Paechter, C., Toft, A., & Carlile, A. (2021). Non-binary Young People and Schools: Pedagogical Insights From a Small-Scale Interview Study. *Pedagogy, Culture and Society*, 29(5), 695–713. <https://doi.org/10.1080/14681366.2021.1912160>
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. PT Grasindo. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Rustam, N., & Situmorang, J. (2020). Memahami Perbedaan Gender Dalam Perspektif Islam Dan Socio-Kultural. *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 14(2), 117.
- Saeful, A. (2019). Kesetaraan Gender dalam Dunia Pendidikan. *Tarbawi*, 1, 17–30.
- Suhra, S. (2013). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Quran dan Implikasi Terhadap Hukum Islam. *Jurnal Al-Ulum*, 13(2), 373–394.

- Wahyudi, D., Ali, M., & Saputri, I. V. (2019). Internalisasi Nilai Kesetaraan Gender Dalam Praktik Pendidikan Islam Responsif Gender. *JSGA : Jurnal Studi Gender dan Agama*, 01(02), 83–102. <https://www.repository.metrouniv.ac.id/index.php/jsga/article/view/2171>
- Zubaida, S. (2005). Islam and Secularization. *Asian Journal of Social Science*, 33(3), 438–448.